

## Analisis Kemampuan Kinerja Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Lombok Barat Periode 2018-2022

<sup>1</sup>Lina Ma'anur Rapika, <sup>2</sup>I Made Murjana, <sup>3</sup>Topan Siswanto

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

<sup>1</sup>[linamanur1299@gmail.com](mailto:linamanur1299@gmail.com), <sup>2</sup>[Imademurjana270963@gmail.com](mailto:Imademurjana270963@gmail.com), <sup>3</sup>[topansiswanto45@gmail.com](mailto:topansiswanto45@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to find out how the regional financial capacity is in the implementation of regional autonomy in West Lombok Regency. By using descriptive research methods, by using financial ratios, namely the ratio of independence, the ratio of effectiveness and efficiency ratio, activity ratio and growth ratio. The results showed that the results of the ratio of regional financial independence were indicated by ratios between 0-25% which belonged to an instructive relationship pattern where the role of the Central Government was still large, the level of independence of West Lombok Regency was not yet able to carry out regional autonomy. The effectiveness ratio shows that the realization of Regional Original Revenue has not exceeded the budget and the efficiency ratio in 2018 and 2019 is between 80-90% which is classified as quite efficient, in 2020 and 2021 the ratio is between 90-100% which is classified as less efficient and in 2022 the ratio figure is 100.48% which is classified as inefficient. The activity ratio shows the ratio between 60-80% which belongs to the compatible category. The growth ratio shows that from 2018 to 2019 the growth of Local Own Revenue increased by 13.92% which is relatively low, the growth of Local Own Revenue from 2019 to 2020 decreased by -11.36% which is very low, the growth of Regional Own Revenue from 2020 to 2021 it has increased by 34.63% which is classified as moderate and the growth of Local Own Revenue in 2021 towards 2022 has decreased by -8.85% which is very low.*

**Key words** : *Regional Revenue and Expenditure Budget Performance, Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan metode penelitian deksriptif, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio di antara 0-25 % yang tergolong dalam pola hubungan instruktif yang dimana peran Pemerintah Pusat masih banyak, daerah Kabupaten Lombok Barat tingkat kemandiriannya belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi PAD belum melampaui anggaran dan rasio efisiensi pada tahun 2018 dan 2019 angka rasio di antara 80-90 % yang tergolong cukup efisien, pada tahun 2020 dan 2021 angka rasio di antara 90-100 % yang tergolong kurang efisien dan pada tahun 2022 angka rasio 100,48 % yang tergolong tidak efisien. Rasio aktivitas menunjukkan angka rasio di antara 60-80 % yang tergolong dalam kategori serasi. Rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa dari tahun 2018 menuju tahun 2019 pertumbuhan PAD meningkat sebesar 13,92 % yang tergolong rendah, pertumbuhan PAD dari tahun 2019 menuju tahun 2020 penurunan sebesar -11,36 % yang tergolong rendah sekali, pertumbuhan PAD dari tahun 2020 menuju tahun 2021 meningkat sebesar 34,63 % yang tergolong sedang dan pertumbuhan PAD tahun 2021 menuju tahun 2022 menurun sebesar -8,85 % yang tergolong rendah sekali.

**Kata Kunci** : Kinerja APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu cara dalam pengembangan secara menyeluruh pada masing-masing daerah untuk membangun, mengelola dan mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dalam hal ini otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah atas tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintah. Hal ini merupakan bentuk telah berkembangnya kehidupan yang berdemokrasi untuk mendapatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Munculnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, peran keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah begitu pula dengan besarnya belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan dan pengeluaran merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah atau tingkat kemandirian daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menemukan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis atau akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani dkk, 2020:53).

### Teknik Analisis Data

#### Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1  
 Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25 %	Instruktif
Rendah	25-50 %	Konsultatif
Sedang	50-75 %	Partisipatif
Tinggi	75-100 %	Delegatif

Sumber : Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.327/1996.

### Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan (PAD)}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan PemDa dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai 100 atau lebih dari 100%.

Tabel 2  
 Kriteria Penilaian Efektifitas PAD

Persentase (%)	Tingkat Efektifitas
100 – ke atas	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
Di bawah 60	Tidak efektif

Sumber : Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.327/1996.

### Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Tabel 3  
 Kriteria Penilaian Efisiensi

Persentase	Tingkat Efisiensi
di bawah 60	Sangat efisien
60 – 80	Efisien
80 – 90	Cukup efisien
90 – 100	Kurang efisien
100 – ke atas	Tidak efisien

Sumber : Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.327/1996.

### Rasio Aktifitas

$$\text{Rasio Aktifitas} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti persentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 4  
 Pedoman Penilaian Keserasian Belanja Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0-20	Tidak Serasi
20-40	Kurang Serasi
40-60	Cukup Serasi
60-80	Serasi
80-100	Sangat Serasi

Sumber : Sudaryo dkk, 2017:15

### Rasio Pertumbuhan PAD

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan perumbuhannya. Semakin tinggi persentase pertumbuhan maka semakin baik.

Tabel 5

## Pedoman Penilaian Pertumbuhan

Kemampuan Keuangan	Pertumbuhan (%)
Rendah Sekali	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber : Depdagri (1997), Kepmendagri No. 690.900.327/1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tebel 6

 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	Transfer Pusat + Transfer Daerah + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Keterangan
2018	216.921.279.505	1.339.626.957.821	16,19 %	Instruktif
2019	247.115353.485	1.550.540.638.643 + 44.987.277.506	15,48 %	Instruktif
2020	219.038.703.946	1.373.054.356.910 + 123.771.112.336	14,63 %	Instruktif
2021	294.901.152.910	1.340.148.624.763	22,00 %	Instruktif
2022	268.803.499.788	1.460.389.783.585	18,40 %	Instruktif

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2018 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 16,19 %. Yang berarti bahwa kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahannya termasuk dalam kategori insrtuktif, yang dimana peran Pamarintah Pusat masih banyak dalam kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat karena PAD yang di hasilkan masih belum cukup untuk melakukan pemerintahan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih belum cukup untuk membiayai sendiri daerahnya.

Tahun 2019 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar 15,48 %. Yang dimana kemampuan membiayai kegiatan pemerintahannya masih tergolong insrtuktif, yang dimana Pemerintah Daerah masih belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah,

pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih belum cukup untuk membiayai sendiri daerahnya.

Tahun 2020 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 14,63 %. Yang dimana kemampuan membiayai kegiatan pemerintahannya masih tergolong insrtuktif, yang dimana Pamarintah Daerah masih belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih belum cukup untuk membiayai sendiri daerahnya.

Tahun 2021 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah megalami peningkatan 22,00 %. Yang dimana kemampuan membiayai kegiatan pemerintahannya masih tergolong insrtuktif, yang dimana Pamarintah Daerah masih belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih belum cukup untuk membiayai sendiri daerahnya.

Tahun 2022 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar 18,40 %. Yang dimana kemampuan membiayai kegiatan pemerintahannya masih tergolong insrtuktif, yang dimana Pamarintah Daerah masih belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih belum cukup untuk membiayai sendiri daerahnya.

Tebel 7  
 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
2018	216.921.279.505	254.444.383.760	85,25 %	Kurang efektif
2019	247.115353.485	281.812.802.076	87,68 %	Kurang efektif
2020	219.038.703.946	251.904.996.796	86,95 %	Kurang efektif
2021	294.901.152.910	314.918.940.275	93,64 %	Efektif
2022	268.803.499.788	356.051.018.264	75,49 %	Kurang efektif

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2018 anggaran PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 254.444.383.760 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 216.921.279.505 sehingga Rasio Efektivitas sebesar 85,25 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Tahun 2019 anggaran PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 281.812.802.076 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 247.115.353.485 sehingga Rasio Efektivitas sebesar 87,68 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Tahun 2020 anggaran PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 251.904.996.796 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 219.038.703.946 sehingga Rasio Efektivitas sebesar 86,95 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Tahun 2021 anggaran PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 356.051.018.264 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 294.901.152.910 sehingga Rasio Efektivitas sebesar 75,49 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori efektif. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan.

Tahun 2022 anggaran PAD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 251.904.996.796 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 268.803.499.788 sehingga Rasio Efektivitas sebesar 86,95 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Tabel 8  
 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
2018	1.419.620.896.553	1.651.940.748.000	85,93 %	Cukup efisien
2019	1.611.053.353.403	1.908.044.072.128	84,44 %	Cukup efisien
2020	1.530.227.274.193	1.687.931.694.537	90,65 %	Kurang efisien
2021	1.661.844.691.559	1.709.674.604.673	97,20 %	Kurang efisien
2022	1.740.587.495.615	1.732.193.283.373	100,48 %	Tidak efisien

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2018 biaya belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.419.620.896.553 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.651.940.748.000. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 85,93 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah cukup efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2019 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.611.053.353.403 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.908.044.072.128. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 84,44 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah cukup efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2020 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.530.227.274.193 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.687.931.694.537. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 90,65 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2021 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.661.844.691.559 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.709.674.604.673. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 97,20 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang

dikeluarkan cukup tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tahun 2022 biaya belanja daerah yang dikeluarkan sebesar Rp 1.740.587.495.615 dan pendapatan daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp 1.732.193.283.373. Rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 100,48 % yang dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mengumpulkan pendapatan daerah kurang efisien, karena biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari pada pendapatan daerah yang diperoleh.

Tabel 9  
 Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Total Belanja Rutin	Total Belanja Daerah	Rasio Aktivitas (%)	Keterangan
2018	1.238.923.417.652	1.419.620.896.553	77,65 %	Serasi
2019	1.192.458.299.777	1.611.053.353.403	72,31 %	Serasi
2020	1.132.853.395.232	1.530.227.274.193	74,03 %	Serasi
2021	1.165.071.271.363	1.661.844.691.559	71,75 %	Serasi
2022	1.102.398.341.466	1.740.587.495.615	71,17 %	Serasi

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2018 total belanja rutin yang dikeluarkan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.238.923.417.652 dengan total belanja daerah sebesar Rp 1.419.620.896.553. Dengan demikian Rasio Aktivitas yang diperoleh sebesar 77,65 %. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memprioritaskan keuangan daerahnya untuk belanja rutin yang dimana keuangan yang digunakan untuk belanja modal/belanja pembangunan cenderung lebih kecil.

Tahun 2019 total belanja rutin yang dikeluarkan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.192.458.299.777 dengan total belanja daerah sebesar Rp 1.611.053.353.403. Dengan demikian Rasio Aktivitas yang diperoleh sebesar 72,31 %. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memprioritaskan keuangan daerahnya untuk belanja rutin yang dimana keuangan yang digunakan untuk belanja modal/belanja pembangunan cenderung lebih kecil.

Tahun 2020 total belanja rutin yang dikeluarkan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.132.853.395.232 dengan total belanja daerah sebesar Rp 1.530.227.274.193. Dengan demikian Rasio Aktivitas yang diperoleh sebesar 74,03 %.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memprioritaskan keuangan daerahnya untuk belanja rutin yang dimana keuangan yang digunakan untuk belanja modal/belanja pembangunan cenderung lebih kecil.

Tahun 2021 total belanja rutin yang dikeluarkan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.165.071.271.363 dengan total belanja daerah sebesar Rp 1.661.844.691.559. Dengan demikian Rasio Aktivitas yang diperoleh sebesar 71,75 %. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memprioritaskan keuangan daerahnya untuk belanja rutin yang dimana keuangan yang digunakan untuk belanja modal/belanja pembangunan cenderung lebih kecil.

Tahun 2022 total belanja rutin yang dikeluarkan Perintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 1.102.398.341.466 dengan total belanja daerah sebesar Rp 1.740.587.495.615. Dengan demikian Rasio Aktivitas yang diperoleh sebesar 71,17 %. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat lebih memprioritaskan keuangan daerahnya untuk belanja rutin yang dimana keuangan yang digunakan untuk belanja modal/belanja pembangunan cenderung lebih kecil.

Tebel 10  
 Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat  
 Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD X <sub>n</sub>	Realisasi PAD X <sub>n-1</sub>	Rasio Pertumbuhan (%)	Keterangan
2018	216.921.279.505	-	-	-
2019	247.115353.485	216.921.279.505	13,92 %	Rendah
2020	219.038.703.946	247.115353.485	-11,36 %	Rendah Sekali
2021	294.901.152.910	219.038.703.946	34,63 %	Sedang
2022	268.803.499.788	294.901.152.910	-8,85 %	Rendah Sekali

Sumber : Data Diolah (2023)

Pada tahun 2018 pendapatan yang diterima sebesar Rp 216.921.279.505 mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp 247.115353.485, dengan demikian hasil Rasio Pertumbuhan yang diperoleh dari tahun 2018 menuju tahun 2019 sebesar 13,92 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari tahun 2018 menuju tahun 2019 terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah meningkat akan tetapi meningkat dalam kategori rendah.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 219.038.703.946, dengan demikian hasil Rasio Pertumbuhan yang diperoleh tahun 2020 sebesar -11,36% yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 terbilang rendah sekali. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 294.901.152.910, dengan demikian hasil Rasio Pertumbuhan yang diperoleh tahun 2020 sebesar 34,63 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari tahun 2020 menuju tahun 2021 terbilang sedang. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat akan tetapi meningkat dalam kategori sedang.

Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 268.803.499.788, dengan demikian hasil Rasio Pertumbuhan yang diperoleh tahun 2020 sebesar -8,85 % yang dimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari tahun 2021 menuju tahun 2022 terbilang rendah sekali. Hal ini disebabkan karena penghasilan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diperoleh lebih kecil dari tahun sebelumnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio keuangan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat periode tahun 2018-2022 masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang tingkat ketergantungan yang masih tinggi pada pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD belum melampaui anggaran dan rasio efisiensi terbilang cukup efisien.
3. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa keuangan daerah lebih diprioritaskan pada belanja rutin dari pada belanja modal.
4. Rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang tidak stabil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa M. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Sulawesi : Unimal Press.
- Astuti, Lenny D, Supitriyani, Khairul, & Elly. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Anike D. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, 72-88.
- Depdagri. (1997). Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.
- Desferi Nanda Putera. (2020). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014-2018)*. Skripsi S1. Institut Agama Islam Negeri.
- Hardani, Andriani H, Ustiawaty J, Utami E F, Istiqomah R R, & Fardani R A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Indri. (2020). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) (Studi Kasus Di Kota Mataram Periode Tahun 2015-2019)*. Skripsi S1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.
- Karsono Bambang, & Sayuket Amalia. (2021). *Buku Ajaran Otonomi Daerah Perspektif Hukum Security Dalam Negara Demokrasi*. Jakarta : Ubhara Jaya Press.
- Marpaung Linjet Anna, Jainah Zainab Ompu, & Seftiniara Intan Nurina. (2019). *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Bandar Lampung : Pustaka Media.
- Norma. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang*. Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sudaryo Yoyo, Sjarif Devyanti, & Sofiati Nunung. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Wastam W. (2018). *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wita Liantino. (2018). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah(BPPKAD) Di Kota Surakarta*. Skripsi S1. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulandari Phaureula Artha, & Iryanie Emy. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.

Widya S. (2021). *Kinerja Keuangan*. Medan : Unpri Press.